

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.634040/2026

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 04
Tanggal : 18 Februari 2026

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 - 2. Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
 - 3. Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
 - 4. Kode>Nama Satker : (634040) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB
 - Sebesar : Rp. 61.054.435.000 (ENAM PULUH SATU MILIAR LIMA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	19.656.289.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	158.704.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	41.239.442.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	41.239.442.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 61.054.435.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

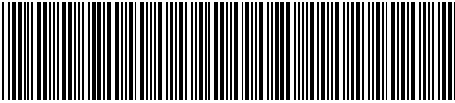
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 018.09.2.634040/2026

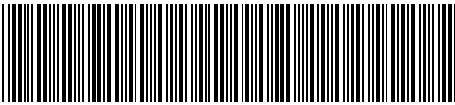


DS:0076-5910-9239-2149

Satker : (634040) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB

EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	41.398.146.000
EC.7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp.	41.398.146.000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp.	10.010.810.000
HA.7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp.	10.010.810.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	9.645.479.000
WA.6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp.	9.645.479.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 018.09.2.634040/2026
I A. INFORMASI KINERJA

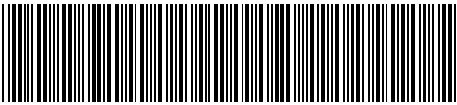


DS:0076-5910-9239-2149

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (634040) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB

										Halaman : I A. 1
Program	:	018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							41.398.146.000
Kegiatan	:	7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian							41.398.146.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7911.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi			100,00	orang	40.000.000	
Rincian Output	:	01	AEF.009	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian			100.00	orang	40.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7911.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			1,00	Lembaga	80.000.000	
Rincian Output	:	01	BDB.001	Pendampingan Lembaga Penerap Standar			1.00	Lembaga	80.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk			32,00	Produk	38.704.000	
Rincian Output	:	01	BJA.009	Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian			32.00	Produk	38.704.000	
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7911.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			1,00	Lembaga	41.239.442.000	
Rincian Output	:	01	QDB.001	Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment (PN)			1.00	Lembaga	41.239.442.000	
Program	:	018.09.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas							10.010.810.000
Kegiatan	:	7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian							10.010.810.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7912.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			8.034,50	Unit	350.343.000	
Rincian Output	:	01	CAG.006	Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya Spesifik Lokasi			34,50	Unit	258.893.000	
		02	CAG.009	Bibit Sumber Peternakan Lainnya Spesifik Lokasi			8000.00	Unit	91.450.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 018.09.2.634040/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0076-5910-9239-2149

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (634040) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB

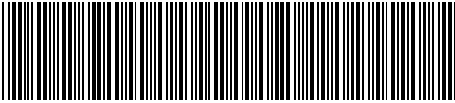
Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	7912.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		345,00	Unit	9.593.218.000
Rincian Output		:	01	RAG.005	Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi (PN)	145.00	Unit	2.509.387.000
		:	02	RAG.006	Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi (PN)	100.00	Unit	851.950.000
		:	03	RAG.007	Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi (PN)	100.00	Unit	6.231.881.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7912.SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk		1,00	produk	67.249.000
Rincian Output		:	01	SDA.006	Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern (PN)	1.00	produk	67.249.000
Program		:	018.09.WA	Program Dukungan Manajemen				9.645.479.000
Kegiatan		:	6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian				9.645.479.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	9.637.427.000
Rincian Output		:	01	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	65.976.000
		:	02	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	9.565.949.000
		:	03	EBA.Z03	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon II ke bawah)	1.00	Layanan	2.977.000
		:	04	EBA.Z07	Layanan BMN (Eselon II ke bawah)	1.00	Layanan	2.525.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		8,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	8.052.000
Rincian Output		:	01	EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Eselon II ke bawah)	8.00	Rekomendasi	8.052.000

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 018.09.2.634040/2026
I B. SUMBER DANA



DS:0076-5910-9239-2149

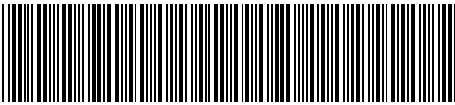
Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (634040) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	61.054.435.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0
1. Rupiah Murni	Rp.	19.656.289.000		(2) RPLN	US\$	2.824.620
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	41.239.442.000		(2) RHLN	US\$	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	INTERNATIONALBANKFOR	USD						
		9341-ID	USD	2.499,36					
		1LAVQJMA	IDR	41.239.442,00	3	41.239.442			
1	1	INTERNATIONALBANKFOR	USD						
		9341-ID	USD	2.499,36					
		1LAVQJMA	IDR	41.239.442,00	3	41.239.442			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 018.09.2.634040/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



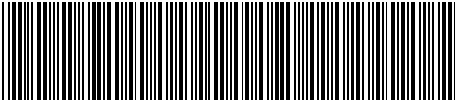
DS:0076-5910-9239-2149

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (634040) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
634040	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB	7.005.115	48.817.920	5.231.400	-	-	61.054.435	23 . 01	
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	-	36.166.746	5.231.400	-	-	41.398.146		
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	-	36.166.746	5.231.400	-	-	41.398.146		
7911.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (23.01 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. LOMBOK BARAT)	-	40.000	-	-	-	40.000		
04	PNBP	-	40.000	-	-	-	40.000		
7911.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (23.01 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. LOMBOK BARAT)	-	80.000	-	-	-	80.000		
04	PNBP	-	80.000	-	-	-	80.000		
7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk (23.01 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. LOMBOK BARAT)	-	38.704	-	-	-	38.704		
04	PNBP	-	38.704	-	-	-	38.704		
7911.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (23.01 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. LOMBOK BARAT)	-	36.008.042	5.231.400	-	-	41.239.442		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 018.09.2.634040/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



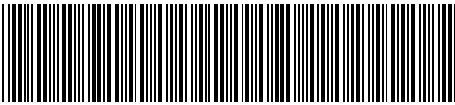
DS:0076-5910-9239-2149

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (634040) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	PLN	-	36.008.042	5.231.400	-	-	41.239.442	038@	RK 1LAVQJMA
018.09.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	-	10.010.810	-	-	-	10.010.810		
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	-	10.010.810	-	-	-	10.010.810		
7912.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (23.01 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. LOMBOK BARAT)	-	350.343	-	-	-	350.343	23 . 01	
01	RM	-	350.343	-	-	-	350.343	038	
7912.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (23.01 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. LOMBOK BARAT)	-	9.593.218	-	-	-	9.593.218	23 . 01	
01	RM	-	9.593.218	-	-	-	9.593.218	038	
7912.SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk (23.01 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. LOMBOK BARAT)	-	67.249	-	-	-	67.249	23 . 01	
01	RM	-	67.249	-	-	-	67.249	038	
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	7.005.115	2.640.364	-	-	-	9.645.479	038	
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	7.005.115	2.640.364	-	-	-	9.645.479		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 018.09.2.634040/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0076-5910-9239-2149

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (634040) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB
Kewenangan : (KD)

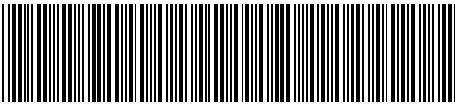
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (23.01 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. LOMBOK BARAT)	7.005.115	2.632.312	-	-	-	9.637.427	23 . 01	
	01 RM	7.005.115	2.632.312	-	-	-	9.637.427	038	
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (23.01 NUSA TENGGARA BARAT / KAB. LOMBOK BARAT)	-	8.052	-	-	-	8.052	23 . 01	
	01 RM	-	8.052	-	-	-	8.052	038	
JUMLAH		7.005.115	48.817.920	5.231.400	-	-	61.054.435		

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 018.09.2.634040/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0076-5910-9239-2149

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (634040) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	634040	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB													
		RENCANA PENARIKAN DANA	419.118	871.486	2.740.622	2.269.705	2.444.991	2.697.359	2.663.367	2.646.641	2.619.710	15.474.525	14.629.406	11.577.507	61.054.435
		BELANJA PEGAWAI	407.736	478.452	932.805	509.006	509.006	910.274	509.006	509.006	509.006	507.046	500.744	723.027	7.005.115
		BELANJA BARANG	11.381	393.033	1.786.417	1.745.699	1.920.985	1.772.085	2.124.361	2.122.635	2.065.704	11.952.479	12.083.662	10.839.480	48.817.920
		BELANJA MODAL	0	0	21.400	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000	45.000	3.015.000	2.045.000	15.000	5.231.400
		018.09.EC.7911 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	0	0	889.442	460.000	545.000	555.000	905.000	955.000	1.045.000	13.945.000	13.095.000	9.003.704	41.398.146
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	868.042	445.000	530.000	540.000	875.000	940.000	1.000.000	10.930.000	11.050.000	8.988.704	36.166.746
		53 BELANJA MODAL	0	0	21.400	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000	45.000	3.015.000	2.045.000	15.000	5.231.400
		018.09.HA.7912 Perakitan dan Modernisasi Pertanian	0	59.387	690.000	1.075.012	1.185.012	1.045.012	1.045.012	965.012	862.061	810.012	835.012	1.439.278	10.010.810
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	59.387	690.000	1.075.012	1.185.012	1.045.012	1.045.012	965.012	862.061	810.012	835.012	1.439.278	10.010.810
		018.09.WA.6918 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	419.118	812.099	1.161.180	734.693	714.979	1.097.347	713.355	726.629	712.649	719.513	699.394	1.134.525	9.645.479
		51 BELANJA PEGAWAI	407.736	478.452	932.805	509.006	509.006	910.274	509.006	509.006	509.006	507.046	500.744	723.027	7.005.115
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	11.381	333.646	228.375	225.687	205.973	187.073	204.349	217.623	203.643	212.467	198.650	411.498	2.640.364
		PERKIRAAN PENERIMAAN	19.195	19.195	19.195	19.195	19.195	19.195	19.195	19.195	19.195	19.195	19.195	19.208	230.353
		- PNBP (425112)	13.118	13.118	13.118	13.118	13.118	13.118	13.118	13.118	13.118	13.118	13.118	13.122	157.420
		- PNBP (425131)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.086	12.933
		- PNBP (425289)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001

Kementerian Negara/Lembaga : [018] KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi : [09] BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

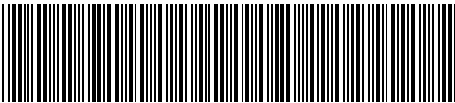
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT

Kode dan Nama Satker : [634040] Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN				
634040	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB			7911.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	38.385.282		521211	Belanja Bahan(PNBP)			
	52	Belanja Barang	Rp.		33.175.282	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	23.713	
	53	Belanja Modal	Rp.		5.210.000	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian			521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)				
7911.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi			7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk				
	521211	Belanja Bahan(PNBP)			521211	Belanja Bahan(PNBP)			
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp.		9.728		Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	5.962
		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	522141	Belanja Sewa(PNBP)			522131	Belanja Jasa Konsultan(PNBP)			
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp.		1.900		Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.000
		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)			524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)			
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp.		1.900		Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	21.641
		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya			
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)			7911.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp.			8.313	521211	Belanja Bahan(PLN)	
		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya					Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	498.553
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya							
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya							
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya							
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya							
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 018.09.2.634040/2026
IV A. B L O K I R



DS:0076-5910-9239-2149

Kementerian Negara/Lembaga : [018] KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : [09] BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker : [634040] Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB

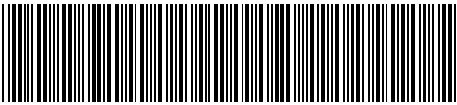
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Belum dilengkapi NOL dari Lender		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PLN)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PLN)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 194.000
	Belum dilengkapi NOL dari Lender		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PLN)	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (PLN)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 65.800		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.000.000
	Belum dilengkapi NOL dari Lender		Belum dilengkapi NOL dari Lender
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku(PLN)	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PLN)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 472.287		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.210.000
	Belum dilengkapi NOL dari Lender		Belum dilengkapi NOL dari Lender
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
522141	Belanja Sewa(PLN)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 211.600		
	Belum dilengkapi NOL dari Lender		
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
522151	Belanja Jasa Profesi(PLN)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 173.500		
	Belum dilengkapi NOL dari Lender		
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PLN)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.343.760		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PLN)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.064.000		

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 018.09.2.634040/2026
IV B. C A T A T A N



DS:0076-5910-9239-2149

Kementerian Negara/Lembaga : [018] KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : [09] BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker : [634040] Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001